



DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

LAPORAN RENCANA KERJA (RENJA)

2025

Jalan Prof.Moh.Yamin No.17 Palu



www.dpp.sultengprov.go.id



(0451) 8454711 Fax.(0451)8454711



dispang@sultengprov.go.id



KATA PENGANTAR

Pangan merupakan prasyarat utama dalam membangun dan menciptakan sumberdaya yang handal dan berkualitas. Kompleksnya persoalan pangan ditingkat wilayah harus diatasi dengan perencanaan yang komprehensif dan simultan serta melibatkan seluruh komponen masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang begitu kompleks disektor pangan dan pada sisi lain merupakan upaya untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026 menuju Sulawesi Tengah yang maju mandiri dan berdaya saing. Renja Dinas Pangan Tahun 2025 juga merupakan acuan dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan dibidang ketahanan pangan.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2025 telah disesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026 serta Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI sehingga muatan Renja akan secara signifikan membantu tercapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan.

Disadari bahwa materi dan teknik penyusunan yang disajikan dalam Rencana Kerja ini cakupannya belum maksimal, serta alat analisis yang digunakan masih sangat sederhana sehingga diperlukan adanya kajian yang lebih mendalam tentang metode pengumpulan, pengolahan/estimasi serta analisis data. Untuk itu, kami mengharapkan agar seluruh pihak yang berkompeten dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat konstruktif, sehingga dalam penyusunan Renja Dinas Pangan pada masa mendatang akan lebih baik dan sempurna.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 kami ucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palu, Januari 2025

**KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Ir. H. ISKANDAR NONGTJI, ST., MM
NIP. 19650606 199603 1 004

BAB I. PENDAHULUAN

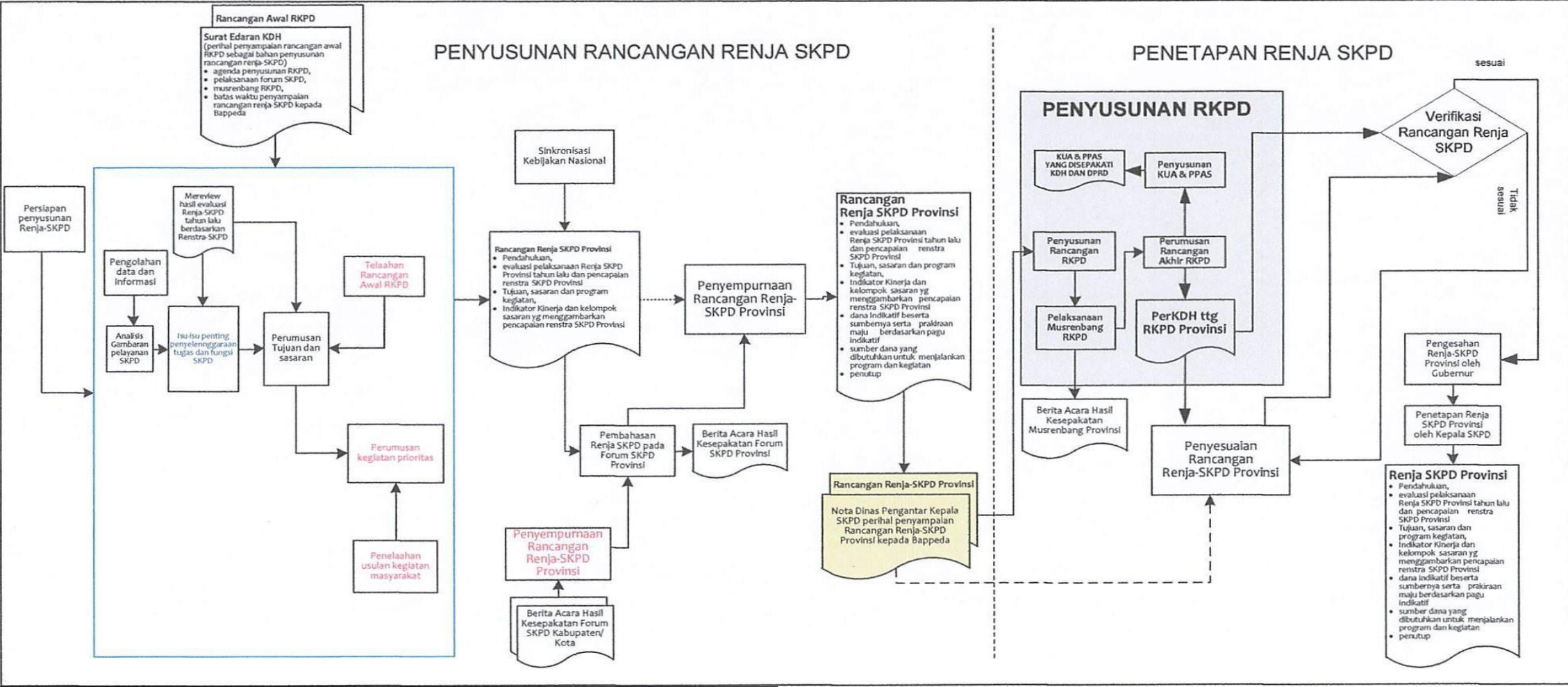
1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk Periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan melihat hasil kinerja perangkat daerah yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, fenomena yang terjadi saat ini dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Adapun secara umum hubungan dokumen Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.a
Bagan alur Tahapan Penyusunan Renja OPD Provinsi



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ; 273/KPTS/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;
16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
17. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Pemendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 13 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 63 tahun 2016 Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi.

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 adalah untuk ;
 - Mengkorelasikan antara dokumen Perencanaan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah
 - Menjadikan Dokumen Rencana Kerja sebagai dasar perumusan target kinerja dan penganggaran program kegiatan demi terwujudnya optimalisasi pencapaian manfaat.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja adalah untuk memudahkan pelaksanaan program kegiatan dan menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan semua jajarannya yang ada dalam mengendalikan dan memutuskan kebijakan pembangunan pada tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah dan merupakan break down dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). serta berpedoman pada Renstra 2022 - 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PANGAN PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PANGAN PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Tahun 2024

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pangan.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024.

Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 35.610.629.526,11-** dengan capain realisasi kinerja fisik sebesar **Rp. 33.789.544.566,90,-** atau sebesar **(94,89%)** dan capaian realisasi keuangan sebesar **Rp. 33.789.544.566,90** atau sebesar **(94,89%)** tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan 4 (Empat) target capaian kinerja dan 19 (Sembilan Belas) indikator output, Rincian Capaian kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi
1.	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	32 Unit	32 Unit
	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Infrastruktur Logistik	1 laporan	1 laporan
2.	Tersedianya Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	4 Unit	4 Unit

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi
1.	Tersedianya Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan
2.	Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan
3.	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan
4.	Tersusunnya Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	4 Unit	4 Unit
5.	Tersedianya Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan
6.	Tersedianya Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	376.67 Ton	376.67 Ton
7.	Tersedianya Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan
8.	Tersedianya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen
9.	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	1 Laporan
10.	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1 Laporan	1 Laporan

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan, adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi
1.	Tersedianya Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Tersedianya Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen
3.	Tersedianya Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan, adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi
1.	Tersedianya Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	83 Sertifikat	81 Sertifikat
2.	Tersedianya Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen
3.	Tersedianya Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten / Kota yang Diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen
4.	Tersedianya Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen

Tabel 1. Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024

SEKRETARIAT

N O.	U R A I A N	PAGU (Rp)	TARGET		REALISASI				DEVIASI		SISA ANGGARAN	
			S/D Desember		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		KEUANGAN	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	200.055.650	200.055.650	100	192.504.527	96,23	192.504.527	96,23	7.551.123	3,77	7.551.123	3,77
2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	21.543.500	21.543.500	100	14.485.200	67,24	14.485.200	67,24	7.058.300	32,76	7.058.300	32,76
3	Koordinasi dan penyusunan Perubahan RKA SKPD	11.523.500	11.523.500	100	11.515.500	99,93	11.515.500	99,93	8.000	0,07	8.000	0,07
4	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	18.672.625	18.672.625	100	16.410.500	87,89	16.410.500	87,89	2.262.125	12,11	2.262.125	12,11
5	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	21.339.102	21.339.102	100	19.375.200	90,80	19.375.200	90,80	1.963.902	9,20	1.963.902	9,20
6	Koordinasi dan penyusunan laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	151.039.800	151.039.800	100	127.731.802	84,57	127.731.802	84,57	23.307.998	15,43	23.307.998	15,43
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	384.401.700	384.401.700	100	344.237.163	89,55	344.237.163	89,55	40.164.537	10,45	40.164.537	10,45
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.337.703.242,71	7.337.703.243	100	6.335.271.372	86,34	6.335.271.372	86,34	1.002.431.871	13,66	1.002.431.871	13,66
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	2.052.000.000	2.052.000.000	100	2.039.214.000	99,38	2.039.214.000	99,38	12.786.000	0,62	12.786.000	0,62
10	Koordinasi dan penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun SKPD	98.445.000	98.445.000	100	92.327.400	93,79	92.327.400	93,79	6.117.600	6,21	6.117.600	6,21
11	Peny. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.558.350	5.558.350	100	5.558.350	100	5.558.350,00	100,00	-	0,00	-	-
12	Rekonsiliasi dan Peny. Lap. Barang Milik Daerah pada SKPD	101.375.000	101.375.000	100	88.777.000	87,57	88.777.000,00	87,57	88.777.000	12,43	12.598.000	12,43
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.009.884	16.009.884,00	100	11.543.900	72,10	11.543.900,00	72,10	4.465.984	27,90	4.465.984	27,90

14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	276.649.800	276.649.800	100	258.890.504	93,58	258.890.504	93,58	17.759.296	6,42	17.759.296	6,42
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	443.140.000	443.140.000	100	441.753.000	99,69	441.753.000	99,69	1.387.000	0,31	1.387.000	0,31
16	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	297.840.911,50	297.840.911	100	295.768.377,05	99,30	295.768.377	99,30	2.072.534	0,70	2.072.534	0,70
17	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	133.498.803	133.498.803	100	128.894.900	96,55	128.894.900	96,55	4.603.903	3,45	4.603.903	3,45
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.401.232	347.401.232	100	330.772.153	95,21	330.772.153	95,21	16.629.079	4,79	16.629.079	4,79
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.361.120	186.361.120	100	185.389.090	99,48	185.389.090	99,48	972.030	0,52	972.030	0,52
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.134.362	206.134.362	100	201.861.766	97,93	201.861.766	97,93	4.272.596	2,07	4.272.596	2,07
	JUMLAH	12.310.693.582,21	12.310.693.582	100	11.142.281.704	90,51	11.142.281.704	90,51	1.244.590.878	9,49	1.168.411.878	9,49

BIDANG KETERSESIAN DAN KERAWANAN PANGAN

N O.	U R A I A N	PAGU (Rp)	TARGET		REALISASI				DEVIASI		SISA ANGGARAN	
			S/D Desember		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		KEUANGAN	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	4.839.442.547	4.839.442.547	100	4.808.304.321,39	99,36	4.808.304.321,39	99,36	31.138.226	0,64	31.138.226	0,64
2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	139.878.000	139.878.000	100	128.047.267,00	91,54	128.047.267,00	91,54	50.239.200	8,46	11.830.733	8,46
3	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1.140.764.976	1.140.764.976	100	1.114.675.685,70	97,71	1.114.675.685,70	97,71	26.089.290	2,29	26.089.290	2,29
4	Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	447.754.650	447.754.650	100	409.988.050,00	91,57	409.988.050,00	91,57	37.766.600	8,43	37.766.600	8,43
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	116.439.900	116.439.900	100	115.938.100,00	99,57	115.938.100,00	99,57	501.800	0,43	501.800	0,43
6	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota	145.066.050	145.066.050	100	142.814.000,00	98,45	142.814.000,00	98,45	2.252.050	1,55	2.252.050	1,55
7	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	684.893.600	684.893.600	100	660.623.000,00	96,46	660.623.000,00	96,46	24.270.600	3,54	24.270.600	3,54
	JUMLAH	7.514.239.723	7.514.239.723	100	7.380.390.424,09	98,22	7.380.390.424,09	98,22	172.257.766	1,78	133.849.299	1,78

DISTRIBUSI CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

N O.	U R A I A N	PAGU (Rp)	TARGET		REALISASI				DEVIASI		SISA ANGGARAN	
			S/D Desember		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		KEUANGAN	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	243.442.000	243.442.000	100	234.270.500,00	96,23	234.270.500,00	96,23	9.171.500	3,77	9.171.500	3,77
2	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	1.075.867.500	1.075.867.500	100	917.528.500,00	85,28	917.528.500,00	85,28	158.339.000	14,72	158.339.000	14,72
3	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	4.439.290.128	4.439.290.128	100	4.439.290.128,00	100	4.439.290.128,00	100	-	0	-	-
4	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	328.360.000	328.360.000	100	270.150.000,00	82,27	270.150.000,00	82,27	58.210.000	17,73	58.210.000	17,73
5	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.540.405.667	2.540.405.667	100	2.480.816.001,76	97,65	2.480.816.001,76	97,65	59.589.665	2,82	59.589.665	100
6	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	100.000.000	100.000.000	100	99.012.500,00	99,01	99.012.500,00	99,01	987.500	0,99	987.500	0,99
	JUMLAH	8.727.365.295	8.727.365.295	100	8.441.067.629,76	96,72	8.441.067.629,76	96,72	286.297.665	3,28	286.297.665	3,28

BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN

N O.	U R A I A N	PAGU (Rp)	TARGET		REALISASI				DEVIASI		SISA ANGGARAN	
			S/D Desember		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		KEUANGAN	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapiota per Tahun	925.924.500	925.924.500	100	901.864.966	97,40	901.864.966	97,40	24.059.534	2,60	24.059.534	2,60
2	Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal	2.585.850.847,90	2.585.850.847,90	100	2.476.599.978	95,78	2.476.599.978	95,78	109.250.870	4,22	109.250.870	4,22
3	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	788.488.500	788.488.500	100	773.783.810	98,14	773.783.810	98,14	14.704.690	1,86	14.704.690	1,86
	JUMLAH	4.300.263.848	4.300.263.848	100	4.152.248.754	96,56	4.152.248.754	96,56	148.015.094	3,44	148.015.094	3,44

UPT PSMKP

NO.	U R A I A N	PAGU (Rp)	TARGET		REALISASI				DEVIASI		SISA ANGGARAN	
			S/D Desember		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		KEUANGAN	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	255.925.000	255.925.000	100	254.228.100	99,34	254.228.100	99,34	1.696.900	0,66	1.696.900	0,66
2	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	204.951.750	204.951.750	100	197.023.720	96,13	197.023.720	96,13	7.928.030	3,87	7.928.030	3,87
3	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan segar asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	287.026.000	287.026.000	100	248.999.796	86,75	248.999.796	86,75	38.026.204	13,25	38.026.204	13,25
4	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	271.438.200	271.438.200	100	271.133.639	99,89	271.133.639	99,89	304.561	0,11	304.561	0,11
5	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	54.346.800	54.346.800	100	53.774.225	98,95	53.774.225	98,95	572.575	1,05	572.575	1,05
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.226.200	7.226.200	100	3.939.850	54,52	3.939.850	54,52	3.286.350	45,48	3.286.350	45,48
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.640.000	224.640.000	100	215.283.800	95,84	215.283.800	95,84	9.356.200	4,16	9.356.200	4,16
8	Pengadaan Mebel	124.871.800	124.871.800	100	117.394.000	94,01	117.394.000	94,01	7.477.800	5,99	7.477.800	5,99
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.149.112.308	1.149.112.308	100	1.136.480.000	98,90	1.136.480.000	98,90	12.632.308	1,10	12.632.308	1,10
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.679.020	51.679.020	100	51.659.000	99,96	51.659.000	99,96	20.020	0,04	20.020	0,04
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.850.000	126.850.000	100	123.639.925	97,47	123.639.925	97,47	3.210.075	2,53	3.210.075	2,53
	JUMLAH	2.758.067.078	2.758.067.078	100	2.673.556.055	96,94	2.673.556.055	96,94	84.511.023	3,06	81.280.928	2,95

Capaian Renstra Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2022 – 2026 dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis merupakan dokumen yang memuat tentang tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang pelaksanaannya dirancang selama 5 (lima) tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai. Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Indikator Kinerja berikut target yang ingin dicapai di tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja dari tujuan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025
Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	90.2
	Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat/ Pemerintah	1. Penguatan Cadangan Pangan (Ton)	175
		2. Inflasi Pangan Bergejolak (%)	5
	Menurunnya Daerah Rawan Pangan	1. Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) - Kerawanan Pangan (%)	12.5
		2. Persentase Pemenuhan Infrastruktur untuk mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (%)	100
	Meningkatnya Ketersediaan Energi dan Protein	1. Skor PPH Ketersediaan Pangan	86
Meningkatnya Pengawasan dan Keamanan Pangan	1. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	84	

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Pembangunan daerah Sulawesi Tengah dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pangan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan rencana kerja di lingkungan Dinas pangan. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Dari Indikator kinerja sasaran diatas merupakan tolok ukur pencapaian pelaksanaan jangka menengah dan jangka panjang

Capaian Renstra dapat diukur keberhasilannya dari implementasi Rencana Strategis tahun 2025 diatas, Dinas Pangan menetapkan target kinerja yang harus dicapai. Target yang ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja sasaran maupun indikator tingkat kegiatan dapat dijabarkan pada tabel. 3; sebagai berikut :

Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari tujuan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	RENJA 2024		TARGET 2025
			TARGET	CAPAIAN	
Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	32 Unit	33 Unit	
Meningkatnya cadangan pangan masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	2 Laporan	
Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Inflasi Pangan Bergejolak	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia	4 Unit	5 Unit	
Meningkatnya Ketersediaan Energi dan Protein	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	
Meningkatnya Pengawasan dan Keamanan Pangan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur untuk mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	
	Skor PPH Ketersediaan Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan	
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	4 Unit	5 Unit	
		Informasi Harga Pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	2 Laporan	
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	376,67 Ton	376,67 Ton	
		Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	2 Laporan	

		Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	2 Dokumen	
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	1 Laporan	
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan	
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Anaisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kaupaten / Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	3	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2 Dokumen	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2 Laporan	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	RENJA 2024		TARGET 2025
			TARGET	CAPAIAN	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	
		Jumlah Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	83 Sertifikat	81	
		Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	1	
		Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten / Kota yang Diterbitkan	1	1	
		Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1	1	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	1	

Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat berbagai capaian dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di dalam mengemban tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 2021 – 2026 yang telah diukur dari indikator capaian sasaran.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Ketahanan Pangan merupakan suatu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk Provinsi Sulawesi Tengah program ketahanan pangan telah dimasukkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang merupakan kelanjutan pembangunan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan kedepan tidak terlepas dari kondisi

capaian pembangunan ketahanan pangan yang telah dihasilkan sebelumnya, namun keberhasilan-keberhasilan yang dicapai masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dengan pencapaian akhir bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan-permasalahan ketahanan pangan yang timbul selama ini bersumber dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal diantaranya kekuatan yang belum diberdayakan secara optimal, kelemahan yang tidak teratasi, peluang yang tidak termanfaatkan dan ancaman yang tidak terantisipasi.

Perencanaan kedepan, permasalahan pemantapan ketahanan pangan dapat terpecahkan, sehingga tiap-tiap permasalahan perlu diidentifikasi dan diverifikasi sebagai faktor-faktor pemicu dan penentu keberhasilan pembangunan pemantapan ketahanan pangan. Faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan pemantapan ketahanan pangan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor lainnya yang mempunyai daya ungkit tinggi dalam pemecahan permasalahan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pemantapan ketahanan pangan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Pangan, maka dapat diuraikan beberapa permasalahan mendasar yang perlu terus diupayakan solusi pemecahannya masalahnya. Adapun permasalahan yang sifatnya internal maupun eksternal dan masuk dalam kategori persoalan klasik adalah sebagai berikut :

1. Masih sangat tergantung pada salah satu komoditas pangan pokok yaitu beras, sehingga program penurunan konsumsi beras sangat sulit tercapai
2. Masih rendahnya akses pangan masyarakat yang diakibatkan karena rendahnya daya beli dan pendapatan.
3. Masih terdapat penduduk yang terindikasi penduduk rawan pangan dan rumah tangga miskin, meskipun telah menunjukkan trend yang menurun.
4. Pengembangan kelembagaan lumbung pangan belum berkelanjutan.
5. Dewan Ketahanan Pangan belum maksimal melakukan kegiatannya terutama dalam hal advokasi pangan.
6. Belum maksimalnya system penyediaan pangan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat sehingga masih terdapat sekitar 70 % pangan segar yang beredar dimasyarakat mengandung residu pestisida.
7. Produsen (petani dan pengusaha) pangan segar belum menerapkan prinsip-prinsip

keamanan pangan dalam system usaha taninya.

8. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan segar yang aman dikonsumsi.

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wujud implementasi terhadap rancangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mengetahui sejauh mana substansi RKPD telah dimasukkan dalam Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Review Rancangan Rencana Kerja 2025

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator	Anggaran	Lokasi	Keterangan
1	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) Terhadap Target Jjumlah CBPD Berdasarkan perbadan 15/2023	100%	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	4.431.842.501	Kabupaten Sigi	Pembangunan gudang Cadangan Pangan Pemerintah, Lumbung Pangan dan Lantai Jemur
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	1.310.000.000	Kab Sigi, Kab Donggala, Kota Palu, Kab Parigi, Kab Poso dan Kab Tojo Una2	Pengembangan Kelembagaan yang dibina di kabupaten
			Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	225.000.000	13 Kab/Kota	Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2.310.000.000	13 Kab/Kota	Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah
Jumlah				8.276.842.501		

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator	Anggaran	Lokasi	Keterangan
2	Persentase Daerah Rawan Pangan	13%	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	300.000.000	Profinsi Sulawesi Tengah	Penyusunan Peta FSVA
			Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.375.000.000	Kab Banggai Kepulauan Kec Bulagi Selatan Desa Osan (1)	Intervensi SKPG dengan Pemberian Bantuan Paket Bahan Pokok (Beras, Gula, Minyak, Susu dan Telur)
					Kab Morowali Kec Bungku Selatan Desa Polewali (1)	
					Kab Parigi Moutong Kec Palasa desa Peubounang (1)	
Kab Tojo Una-una Kec Batudaka Desa Siatu (2)						
Kab Poso Kec. Poso Selatan Desa Bukit Bambu(3)						
Kab Tolitoli Kec Baolan Desa Panasakan (3)						
Kab Parigi Moutong Kec Taopa Desa Nunu Rantai (3)						
Kab Banggai Laut Kec Banggai Desa Pasir Putih (3)						
Kab Morowali Utara Kec Petasi Desa Ganda-Ganda(3)						
			Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi		Profinsi Sulawesi Tengah	Penyusunan Peta SKPG
Jumlah				1.675.000.000		

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja Tahun 2025	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator	Anggaran	Lokasi	Keterangan
3	Persentase Pangan Bergejolak Tambah Kuran (plus 1)	5%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	300.000.000	13 Kab/ Kota	melakukan pemantauan stok pasokan dan harga pangan pokok di 13 kab/kota provinsi sulawesi tengah
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	200.000.000	13 Kab/Kota	Menyiapkan data harga baik harian, mingguan maupun bulanan. Dengan cara kerja sama dengan enumerator pasar
			Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi		13 Kab/Kota	Menyiapkan data Prognosa Neraca Pangan Wilaya Provinsi dan Neraca Bahan Makanan untuk memantau ketersediaan stok pangan 11 bahan pokok di 13 kabupaten/kota provinsi sulawesi tengah
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi		13 Kab/Kota, (Palu, Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	Gelar Pangan Murah (GPM)
Jumlah				500.000.000		

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja Tahun 2025	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator	Anggaran	Lokasi	Keterangan
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85 Nilai	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.450.000.000	Kab Tolitoli, Kab Banggai Kepulauan, Kab Banggai Laut, Kab Sigi, Kab Donggala dan Kab Morowali	Desa B2SA dan UMKM Usaha Pangan Lokal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	650.000.000	Kab Tolitoli, Kab Banggai Kepulauan, Kab Banggai Laut, Kab Sigi, Kab Donggala	Promosi Ketahanan Pangan, Pameran dan Edukasi
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	750.000.000	Kab Tolitoli, Kab Banggai Kepulauan, Kab Banggai Laut, Kab Sigi, Kab Donggala	Go to School
Jumlah				2.850.000.000		

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator	Anggaran	Lokasi	Keterangan
5	Persentase Pangan segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	84%	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	270.404.500	13 Kab/Kota	Audit lapang, Surfeilen dan Penerbitan sertifikat
			Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	197.615.050	13 Kab/Kota	Izin Edar PD, Izin Edar Peking Hous dan Helf Sertifikat
			Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	330.071.000	13 Kab/Kota	Rapit Test dan Pos Market
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	270.275.050	13 Kab/Kota	OKKPD
Jumlah				1.068.365.600		
Total				13.870.208.101		

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah telah menetapkan kebijakan secara nasional yang harus menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah mulai dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai Isu strategis telah diangkat sebagai referensi dalam menetapkan arah dan tujuan pembangunan Nasional yang juga merupakan pengayaan terhadap kondisi lingkungan eksternal yang terkait langsung dengan pencapaian pembangunan ketahanan pangan selama 5 (lima) tahun kedepan. Masalah dan tantangan yang masih dihadapi dimasa datang diantisipasi dengan melakukan identifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program, serta RPJMN dan RPJMD sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Isu-isu yang dihasilkan dari identifikasi telah dirumuskan dan dipilih secara nasional, regional, maupun daerah antara lain :

ISU NASIONAL

Isu nasional saat ini terkait ketahanan pangan

KETAHANAN PANGAN YANG MANDIRI DAN BERDAULAT

Undang-undang No 18 Tahun 2012 secara tegas mengamanatkan perlunya Indonesia membangun ketahanan pangan mandiri dan berdaulat. Ketahanan Pangan (food security) adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan

produktif secara berkelanjutan.

Ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan sesuai dengan UU No 8/2012 yaitu: (a) kecukupan ketersediaan pangan; (b) stabilitas ketersediaan pangan, (c) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan, dan (d) kualitas/keamanan pangan. Indikator keberhasilan membangun ketahanan pangan dapat diukur dari kombinasi keempat komponen tersebut.

KEMANDIRIAN PANGAN

Kemandirian Pangan (food resilience), adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat (UU 18 Tahun 2012).

Kemandirian mengacu kepada peningkatan kemampuan negara dan bangsa untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan yang beragam yang bersumber dari dalam negeri melalui pendayagunaan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal secara optimal. Kemandirian dicirikan oleh tiga hal pokok yaitu: (a) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal, (b) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (c) pemanfaatan pangan.

KEDAULATAN PANGAN

Kedaulatan Pangan (food sovereignty), adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Istilah kedaulatan pangan lebih kepada penegasan bahwa sebagai negara merdeka dan berdaulat maka Indonesia mempunyai kebebasan secara berdaulat kedaulatan untuk menentukan strategi, kebijakan dan program serta sistem pangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, tidak dapat diatur, didikte atau diintervensi oleh negara.

STRATEGI PENCAPAIAN KETAHANAN PANGAN YANG MANDIRI DAN BERDAULAT

Atas dasar permasalahan, tantangan dan keinginan untuk pencapaian ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat, dapat dirumuskan dalam enam program utama, yaitu: (1) peningkatan penyediaan pangan melalui pemanfaatan sumber daya domestik, (2) penguatan cadangan pangan, (3) pengelolaan perdagangan pangan bagi kepentingan nasional, (4) penanganan kerawanan pangan kronis dan transien, (5) pengembangan diversifikasi konsumsi pangan, dan (6) perbaikan sistem mutu dan gizi pangan

ISU REGIONAL SULAWESI

Pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi salah satu penghasil pangan utama untuk menopang kebutuhan pangan secara nasional dengan meningkatkan produktifitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, mengembangkan bio-energi serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional.

Beberapa isu strategis di wilayah Sulawesi, yaitu sebagai berikut :

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

2. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Sulawesi Tengah masih cukup tinggi diakibatkan

kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku

lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol persedaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA)

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 OPD Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah mendorong terwujudnya kedaulatan, kemandirian pangan wilayah secara berkelanjutan yang diimplementasikan pada beberapa kegiatan utama yang terdiri atas :

- 1) Kelembagaan yang handal dalam Pemantapan Ketahanan Pangan, *melalui* ;
 - a). *Peningkatan Penguatan Cadangan Pangan*
 - b). *Ketersediaan Informasi distribusi /Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah.*
 - c). *Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.*
 - d). *Pengurangan konsumsi Beras melalui Penganeekaragaman konsumsi Pangan.*
 - e). *Penanganan daerah rawan pangan*
- 2) Menyiapkan tenaga yang kompeten, profesional dalam mengelola ketahanan pangan

- 3) Menciptakan mekanisme kerja yang efektif dan efisien.
- 4) Mewujudkan dukungan dana dalam penyelenggaraan urusan di bidang pangan.
- 5) Penyelenggaraan kegiatan koordinasi antar pusat dan daerah dapat terintegrasi dengan baik.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 terdiri atas program prioritas nasional dan program prioritas daerah. Adapun program/kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

- a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
- c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
- d. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat

- a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- e. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- f. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
- g. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- h. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
- i. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
- j. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- k. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- l. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

3. Program Penanganan Rawan Pangan

- a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis PetaKetahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
- c. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

6. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

7. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

8. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

10. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

11. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Penguatan Jejaring

Keamanan Pangan

- b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- c. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- d. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Rencana Alokasi Anggaran pada OPD Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dipergunakan untuk membiayai program-program Dinas Pangan serta Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Dinas Pangan.

BAB IV. PENUTUP

Dengan adanya regulasi dimaksud maka setiap daerah harus mampu membangun sistem ketahanan pangan yang terintegrasi dengan program pembangunan lainnya ditingkat daerah. Terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan wilayah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, akan sangat ditentukan oleh dukungan pemerintah daerah baik melalui regulasi daerah maupun alokasi anggaran kegiatan yang proporsional. mengingat peran dan fungsi Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah semakin strategis ditengah meningkatnya persoalan pemenuhan pangan secara cukup, aman dan terjangkau. Dukungan anggaran secara proporsional untuk urusan ketahanan pangan akan mendorong tercapainya pelayanan dasar masyarakat serta mengurangi indikasi meningkatnya penduduk rawan pangan.

Konsistensi dukungan anggaran APBD terhadap program dan kegiatan ketahanan pangan sebagaimana yang ada dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 akan sangat menentukan capaian indicator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dimana secara jangka panjang akan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.

